

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amarullah., Rahmatillah, S., 2023, *Penologi dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Anwar, Umar, et al., 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Dinata, Ruhly K., 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sai Wawai Publishing, Bandar Lampung.
- Edrisy, I. F., Irhammudin, Dinata, M. R. K., dan Putri, E., 2023, *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Mahfud., Muh, A., 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sadewo, Fajar A., 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djaya Sinar Perkasa, Tegal.
- Sriwidodo, Joko., 2023, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni, Fitri., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Yanhong, Liu., 2023, *On Substantive Decriminalization*, Routledge, London.

Artikel Jurnal

- Cakra, I. P. T., dan Sulistyawan, A Y., *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020, doi:10.14710/crepido.2.2.59-69
- Fadhilah, H., Relynada, H., Erin, F., Fadhillah, M. R., *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat.*, *Cross Border*, Vol. 5, No. 2, 2022, doi:10.33086/AM.V1I2.583.
- Febriyani, N, H., Hartiwiningsih, *Corporate Criminal Liability Post Elimination of Coal FABA Waste Status From B3 Waste Category in Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 38, No. 1, 2022, doi: 10.14710/CELJ.V6I2.14652.
- Irfani, N., *Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaan Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020, doi: 10.54629/jli.v19i1.1009.

Jiwanti, A., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>.

Rachmat, N. A., *Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>.

Ritonga, Z., Syam, S. A., Lubis, F., *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi KUHP Baru, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13530>.

Sari, I., *Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 32, 2019, doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.

Tarigan, M. A., Namo, A. P., Pratama, G. R., Berutu, S. P., Lubis, A.H., *Analisis Yuridis Terhadap Tindak pidana pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016), Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.420>.

Warjiyati, S., Sari, Z. N., Salam, S., Firdaus, A. A., *Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle's Implementation on Circular Letters and Laws, Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2024, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.

Wendi., Wijaya, F., *Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr), Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Tugas Akhir

Zaeni, A., 2012, *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*, Universitas Islam Negeri Malang, 2012.

Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634).

Internet, Artikel Berita

Agus Sahbani, “Proses Legislasi Ugal-Ugalan, UU Cipta Kerja Dipersoalkan ke MK”, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-legislasi-ugal-ugalan--uu-cipta-kerja-dipersoalkan-ke-mk-lt5f8ab7a0aef18/>, diakses pada 04 Juni 2025.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, “2024: Realisasi Investasi 2024”, <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>, 2024, diakses pada 16 Januari 2025.

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, “Awat Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru”, 2023, <https://pslh.ugm.ac.id/awat-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>, diakses pada 12 Maret 2025.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “DPR-RI Mengesahkan Kerusakan Ekologi dan Kehidupan Generasi Mendatang Melalui Pengesahan PERPPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” 2023, <https://www.walhi.or.id/dpr-ri-mengesahkan-kerusakan-ekologi-dan-kehidupan-generasi-mendatang-melalui-pengesahan-perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>, diakses pada 19 Juli 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Blb, 22 Agustus 2023.